

ANALISIS SIMDA BARANG PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMSEL MENGGUNAKAN *TECHNOLOGY* *ACCEPTANCE MODEL*

Hendra Gunawan¹, Darius Antoni², Muhamad Akbar³

Program Pascasarjana

^{1,2,3}Universitas BinaDarma

^{1,2,3}syeleem@yahoo.com, darius.antoni@binadarma.ac.id,
muhamad.akbar@binadarma.ac.id

^{1,2,3}Jl. A. Yani No.12, Palembang 30624, Indonesia

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah mengukur penerimaan (*acceptance*) pegawai terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang yang diterapkan atau di Impelementasikan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Melihat Pengaruh Penerimaan (*acceptance*) Pegawai terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang menggunakan sistem tertentu di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat mempermudah menyelesaikan kesulitan dalam pekerjaan, melihat pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Barang pada kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mengumpulkan data, Penulis menggunakan teknik wawancara untuk menganalisis hasil penelitian, hasilnya adalah Kemudahan dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang dan Mudah dipahami (*perceived ease of use*), penggunaan (*perceived usefulness*) produktivitas kinerja tugas atau efektivitas dalam penerimaan (*Intention to use*) keinginan tetap untuk menggunakan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Intention to Use*

1 PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang sistem informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi suatu entitas (*entity*) dalam menjalankan aktivitasnya. Kelangsungan hidup organisasi di masa sekarang sangatlah sulit tanpa penggunaan teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu organisasi menghadapi pesatnya arus ekonomi global. Sistem informasi dibangun oleh perusahaan untuk melayani kepentingan pengguna. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi menjadi vital untuk menjalankan bisnis harian serta mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategi.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengaturan urusan rumah tangga daerah, penetapan kebijakan, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri. Salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Untuk dapat menjalankan proses penatausahaan barang milik daerah dengan baik maka pemerintah telah mengatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tujuannya supaya pengelolaan barang milik

negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola barang milik daerah sejak perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penggunaan, hingga penghapusannya (Kementerian Dalam Negeri, 2016).

Pengelolaan barang milik daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintah daerah. Penyajian barang milik daerah di dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting artinya bagi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Instansi pemerintah adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan Kepada Masyarakat. Fokus utama keberhasilan suatu instansi pemerintah bukan diukur pada pencapaian tujuan finansial namun pada tujuan yang berfokus pada aspek nyata dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selama ini keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan karena belum adanya aspek yang menentukan dalam keberhasilan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang yang dapat diketahui tingkat penerimaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang dalam suatu organisasi.

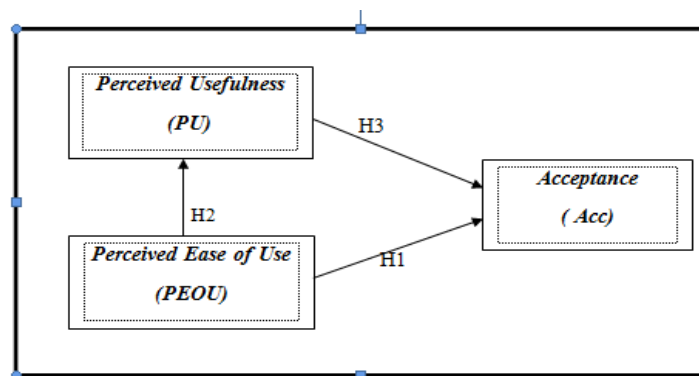
2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Konsep Model Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara wawancara atau interview yang berisikan pertanyaan yang terdiri dari beberapa responden guna mendapatkan informasi untuk penelitian ini, Responden tersebut terdiri dari 7 Responden yang di ambil dari 100 Orang Pegawai.

Jawaban responden dalam penelitian ini hasil akan diukur dengan skala likert dengan interval 1= Sangat Tidak setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Ragu-ragu, 4= Setuju, 5= Sangat setuju.

Telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya bahwa penelitin ini dasar modifikasi model maka pengembangan kerangka pemikiran diuraikan sebagai berikut



Gambar 1. Model Penelitian / Kerangka Pemikiran

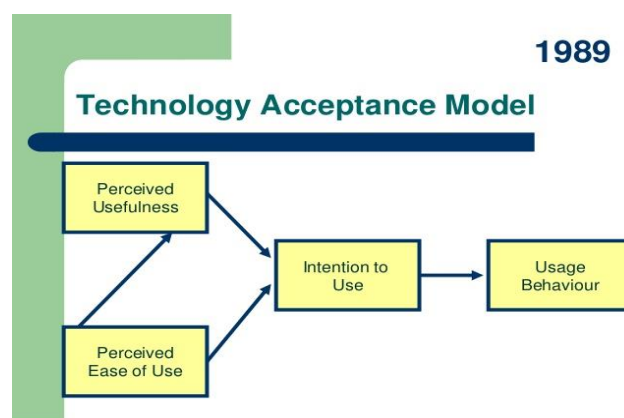
Sistem informasi dapat diartikan sebagai seperangkat komponen yang dapat saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dalam organisasi (Laudon & Laudon, 2005). Selain itu definisi lain dari sistem informasi yaitu suatu rangkaian orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi dan sebuah sistem yang menerima sumber daya akan menggunakan sumber daya tersebut sebagai *input* dan memprosesnya untuk menjadi produk informasi sebagai *output* (O'Brien, 2004).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan saat ini adalah SIMDA Barang Milik Daerah versi 2.0.7 yang merupakan versi terbaru yang dikembangkan oleh BPKP untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sistem operasi untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah adalah Microsoft SQL Server 2008 untuk *server* dan Windows OS untuk *client*. Untuk pemrosesan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilaksanakan secara *batch* maupun *online*.

Rincian tentang proses pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Penatausahaan
5. Pemanfaatab
6. Pemeliharaan
7. Penghapusan
8. Akuntansi

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1986) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Secara skematik teori TAM tergambar di bawah ini.



Gambar 1. Technology Acceptance Model

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

H1 : *Perceived Ease of Use* berpengaruh terhadap *Acceptance*

H2 : *Perceived Ease of Use* berpengaruh terhadap *Perceived Usefulness*

H3 : *Perceived Usefulness* berpengaruh terhadap *Acceptance*

Rumus T x Pn

T = Total Jumlah Responden yang memilih

Pn = Pilihan Angka skor Likert

Penyelesaian akhir

= Total skor/Yx100

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian ini melibatkan 7 responden pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera selatan berikut ini dijelaskan karakteristik responden dalam penelitian ini:

Tabel 1

Responden

Golongan	Ruang				Jumlah Pegawai
	A	B	c	d	
Gol IV	10	-	-	1	11
Gol III	40	10	15	5	70
Gol II	5	5	3	6	19

Variabel yang digunakan dalam hasil pengembangan penelitian ini adalah:

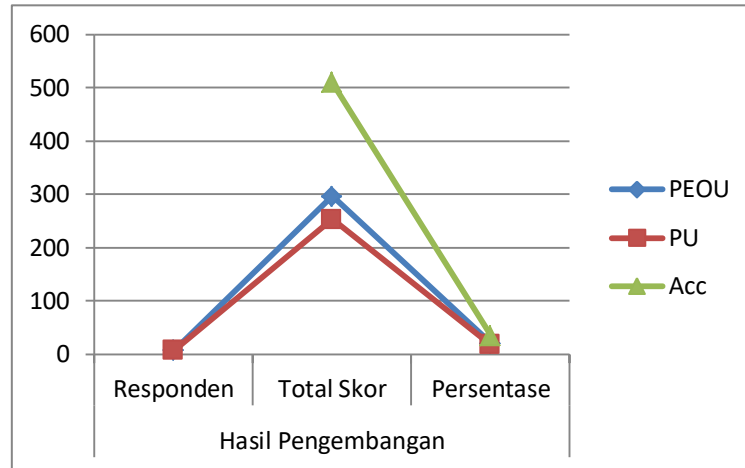
Tabel 2

Hasil Pengembangan Penelitian

Variabel	Hasil Pengembangan		
	Responden	Total Skor	Persentase
Kemudahan Penggunaan (PEUO)	7	297	20,79
Persepsi Manfaat (PU)	7	253	17,92
Penerimaan (Acc)	7	510	35,7
Total Persentase			74,4

Dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang berisi pertanyaan yang merupakan proksi dari variabel yang diteliti. Jawaban responden diukur dengan skala likert.

Bagan Hasil Pengembangan Penelitian



Gambar 2. Hasil Pengembangan Penelitian

Kegunaan (Perceived Usefulness), Persepsi Kegunaan Teknologi mengukur bagaimana persepsi responden terhadap kegunaan SIMDA Barang dalam pekerjaan mereka. Variabel ini diukur dengan menanyakan indikator-indikator sebagai berikut: produktivitas (*productivity*), kinerja tugas atau efektivitas (*job performance/ effectiveness*), pentingnya bagi tugas (*important to job*), dan kegunaan secara keseluruhan (*overall usefulness*).

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis dengan metode *Technology Acceptance Model* dengan mengevaluasi faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi analisis dasar SIMDA Barang Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu dapat melakukan suatu kegiatan seperti meningkatkan kualitas pelayanan SIMDA Barang kepada Sekretariat DPRD sendiri maupun bagi Pemerintahan, meningkatkan sistem kerja input dan output, mengadakan *update* dan *maintenance* terhadap *database*, serta meningkatkan keamanan SIMDA Barang yang ada.
2. Dari analisis yang dilakukan pada SIMDA Barang Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat membuat kesimpulan analisis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SIMDA Barang Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR RUJUKAN

- ANTONI, D., HERDIANSYAH, M. I. & AKBAR, M. Critical factors of transparency and trust for evaluating e-government services for the poor. *Informatics and Computing (ICIC)*, 2017 Second International Conference on, 2017. IEEE, 1-6.
- DARNIS, F. & ANTONI, D. 2016. EVALUASI SISTEM INFORMASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KOTA PALEMBANG.
- Laudon ,(2005) Sistem Informasi untuk mendukung Pengambilan Keputusan.
- BPKP. (2010). Pedoman Pengoperasian SIMDA Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 13(3), 319-340.
- THEO LONANDO, P., ANTONI, D. & AKBAR, M. 2017. Membangun Konsep E-Government Berdasarkan Faktor-Faktor Desain Grafis Di Indonesia Menggunakan Systematic Review.